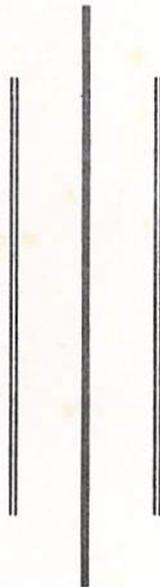




**BUPATI LAMONGAN**

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN  
ATAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



**TAHUN ANGGARAN 2003**



**BUPATI LAMONGAN**

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN  
ATAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2003  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN LAMONGAN**

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Lamongan

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Lamongan

Yth. Para Anggota Muspida Kabupaten Lamongan

*Hadirin dan Sidang Dewan Yang Berbahagia,*

Pertama-tama perkenankanlah saya untuk mengajak saudara-saudara senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian dapat hadir dan berkumpul digedung yang terhormat ini.

Mengawali sambutan saya ini, perkenankanlah juga saya menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 Hijriah, minal

aidzin wal faiidzin, mohon maaf lahir dan bathin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan dan hadirin yang berbahagia, suatu kewajiban bagi saya untuk menyampaikan hal tersebut, karena dalam melaksanakan tugas yang saya emban dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh rakyat Kabupaten Lamongan dimungkinkan masih terdapat kekurangan maupun kekhilafan diluar batas kemampuan yang saya miliki.

Selanjutnya sudah barang tentu saya akan senantiasa untuk terus menerus berusaha mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menumbuhkan dan memberikan stimulasi guna mewujudkan kemajuan pembangunan di seluruh Kabupaten Lamongan.

Sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan tentu memerlukan perjalanan waktu yang ditengahnya masih akan mengalami permasalahan – permasalahan yang akan kita hadapai. Namun demikian dengan kerja keras serta menjaga tekad dan semangat, saya yakin harapan dan cita – cita yang kita miliki akan dapat terealisasi.

*Sidang Dewan Yang Berbahagia,*

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa didalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 memakai sistem yang sama sekali baru yakni Sistem Anggaran Kinerja, yang secara teknis telah dijabarkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebabkan bentuk dan struktur APBD Tahun 2003 mengalami perubahan yang cukup drastis.

Oleh karena itulah kami mengucapkan rasa syukur bahwa akhirnya setelah melewati masa-masa yang berat, saya dapat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003. Betapapun, adalah pantas bila dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kelonggaran waktu bagi Pemerintah untuk mempersiapkan dan sekarang mengajukannya kepada Dewan Yang Terhormat.

Saya memahami pula bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2003 merupakan kali pertama Pemerintah menyusun dalam struktur dan bentuk anggaran kinerja. Sebagai suatu langkah pertama tentunya kami menyadari bahwa hal ini akan membuat pembahasan sedikit rumit, namun demikian hal tersebut tidaklah menyurutkan kita bersama dalam mengimplementasikannya.

Apapun konsekuensinya, bahwa perubahan tersebut diharapkan mampu menciptakan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Dalam kaitan itu, Sistem Anggaran Kinerja diharapkan mampu menciptakan nuansa manajemen keuangan daerah dengan

semakin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dibidang pengelolaan keuangan daerah.

*Sidang Dewan Yang Berbahagia,*

Demikianlah hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut, sekarang perkenankalah saya menyampaikan secara ringkas Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Uraian lebih lengkap mengenai pokok-pokok pikiran dan penjelasan kuantitatif dan kualitatif dapat ditelaah dalam Nota Keuangan yang disampaikan bersama RAPBD ini.

Sebagai dasar kebijakan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 didasarkan pada 3 tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Tahun 2003.

*Pertama*, terwujudnya peningkatan keuangan daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengoptimalkan penggalan dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

*Kedua*, terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, perkembangan IPTEK dan deregulasi Peraturan Perundang-Undangan Dunia Usaha serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

*Ketiga*, terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan memanfaatkan terbukanya Pasar Global, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta pesatnya perkembangan IPTEK.

Selain ketiga kerangka tujuan pokok diatas, penyusunan RAPBD 2003 sudah barang tentu juga mempertimbangkan perkiraan perkembangan perekonomian daerah dan perkembangan ekonomi secara makro baik secara regional maupun nasional.

Asumsi makro yang digunakan adalah dengan mendasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan laju inflansi. Dalam Tahun 2003 prospek perkembangan ekonomi diproyeksikan sebesar 4 % yang berarti sama dengan proyeksi nasional, dan laju inflansi sekitar 9 % yang berarti sama dengan rata-rata laju inflansi nasional Tahun 2002. Pencantuman asumsi dasar tersebut secara langsung akan mempengaruhi tingkat pencapaian proyeksi Pendapatan Daerah dan standard kebutuhan yang sudah dirancang didalam APBD Tahun Anggaran 2003.

Dari asumsi dasar yang telah kita susun tersebut, kita bersyukur bahwa salah satu unsur pokok pertumbuhan ekonomi yaitu kestabilan politik semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak dipungkiri pula bahwa dengan penyelesaian berbagai permasalahan nasional seperti konflik Aceh, termasuk juga dengan hampir terselesaikannya pengungkapan Peristiwa Bom Bali akan semakin menumbuhkan kepercayaan dunia internasional dalam menanamkan investasinya, sehingga mempengaruhi secara langsung perekonomian nasional, yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Dengan kondisi perekonomian tersebut adalah merupakan harapan besar bagi kita akan mendorong perekonomian daerah semakin berkembang.

*Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Dengan perkiraan asumsi tersebut diatas, maka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003, disisi Pendapatan Daerah dirancang penerimaannya sebesar *346 milyar 125 juta 23 ribu 600 rupiah*, sedangkan Belanja Daerah dialokasikan sebesar *353 milyar 711 juta 732 ribu 500 rupiah*, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar *7 milyar 586 juta 708 ribu 900 rupiah*.

Dari uraian diatas bila dilakukan perbandingan secara riil terhadap kapasitas keuangan yang digambarkan melalui volume pendapatan daerah dengan komponen pendapatan yang sama maka Tahun 2003 kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan sebesar *11,51 %*.

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan secara garis besar dari masing-masing komponen APBD baik secara kuantitatif dan kualitatif serta penyertaan anggarannya

### **1. Pendapatan Daerah**

Disisi Pendapatan Daerah, sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk selalu meningkatkan kapasitas keuangan daerah maka perlu dirumuskan kedalam arah dan kebijakan umum Pendapatan Daerah yakni :

*Pertama*, mampu menciptakan kondisi fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dengan mendorong peningkatan pendapatan daerah yang lebih besar daripada peningkatan belanja daerah. Pencapaian ini harus dilakukan

secara bersamaan baik pada sisi Pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

*Kedua*, Proporsi PAD terhadap seluruh Pendapatan Daerah akan lebih didorong untuk semakin meningkat dengan menggali sumber-sumber penerimaan dan melakukan intensifikasi sumber-sumber penerimaan baik melalui perbaikan pemungutan, perbaikan fasilitas pelayanan, pemberdayaan perusahaan daerah dan pemberdayaan pengelolaan keuangan daerah secara maksimal.

*Ketiga*, diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap sumber-sumber penerimaan dari Dana Perimbangan agar supaya dana yang dialokasikan sesuai dengan kondisi dan indikator perekonomian Kabupaten Lamongan.

Secara keseluruhan disisi Pendapatan Daerah, dalam RAPBD 2003 telah diproyeksikan sebesar *346 milyar 125 juta 23 ribu 600 rupiah* yang berarti mengalami kenaikan sebesar *11,51 %*. Dari jumlah tersebut berasal dari komponen yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 26.097.230.600,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 296.135.203.000,00
c. lain-Lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 23.892.590.000,00</u>
	Rp. 346.125.023.600,00

Dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mencapai sebesar *26 milyar 97 juta 230 ribu 600 rupiah* yang berarti mengalami

kenaikan yang cukup besar yaitu *23,77 %* sehingga kenaikan tersebut merupakan kenaikan diatas rata-rata pertahunnya dengan prosentase kurang lebih sebesar *15 %*. Oleh karena itu upaya ini akan semakin terus didorong seiring dengan peningkatan komponen Pendapatan Lainnya, khususnya Dana Perimbangan supaya memiliki proporsi yang semakin baik. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2003 memiliki proporsi terhadap seluruh Pendapatan sebesar *7,5 %*.

Kenaikan yang cukup besar tersebut ditunjang oleh beberapa faktor yang menonjol, antara lain :

1. Dengan adanya rencana kenaikan listrik ditahun mendatang maka proyeksi Pajak Penerangan Jalan diperkirakan mampu mencapai sebesar *5 milyar 250 juta rupiah* atau naik sebesar *16,67 %*.
2. Pajak Pengambilan Bahan galian golongan C diperkirakan mencapai sebesar *100 juta rupiah* atau meningkat sebesar *11,11 %*. Kenaikan tersebut ditunjang oleh semakin membaiknya kesadaran para penambang untuk tertib pungut sebagai dampak dari sosialisasi yang telah diadakan.
3. Dibidang pelayanan Kesehatan, Pemerintah senantiasa untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pada tingkat yang paling bawah yakni di Puskesmas-Puskesmas. Karena dari beberapa kajian yang dilakukan baik oleh RSUD Dr. soegiri dan Dinas Kesehatan memberi kesimpulan bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan mampu meningkatkan kontribusi penerimaan secara signifikan. Retribusi Kesehatan diperkirakan dapat mencapai sebesar *2 milyar 500 juta rupiah* atau mengalami kenaikan sebesar *18,48 %*.

4. Perbaikan fasilitas pengujian kendaraan bermotor juga diharapkan dapat memberikan andil pada kenaikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimana diproyeksikan sebesar *300 juta rupiah* atau mengalami peningkatan sebesar *13,64 %*.
5. Dalam upaya peningkatan PAD, kontribusi dari perusahaan milik daerah akan semakin didorong untuk menunjukkan kinerjanya semakin baik. Hal ini akan dilakukan melalui perubahan visi perusahaan itu sendiri, pengembangan manajerial dan peningkatan portofolio perusahaan milik daerah baik melalui penambahan penyertaan modal dari pemerintah maupun dari hasil usaha. PD Bank Pasar diperkirakan sebesar *393 juta rupiah* atau meningkat sebesar *48,30 %*. PD Aneka Usaha Lamongan Jaya diperkirakan akan berkontribusi sebesar *90 juta rupiah* atau meningkat sebesar *48,76 %*, PT. Bank Jatim dimana pada tahun sebelumnya belum mampu membukukan labanya maka ditahun 2003 dengan kinerjanya yang semakin baik memperkirakan kontribusinya sebesar *150 juta rupiah*.
6. Dengan meningkatnya kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan selalu

diupayakan untuk mengendalikan dan memberdayakan Kas Daerah secara maksimal. Dari Jasa Giro diperkirakan dapat mencapai sebesar *348 juta 423 ribu rupiah* atau meningkat sebesar *16,76 %*, dan penerimaan Deposito mencapai sebesar *6 milyar 566 juta 575 ribu rupiah* atau meningkat sebesar *54,09 %*.

7. Penerimaan Usaha Dinas setiap tahunnya didorong untuk semakin meningkat melalui berbagai usaha dinas dalam rangka pengenalan teknologi tepat guna, pemberian stimulasi usaha kepada masyarakat sekaligus dapat berkontribusi didalam Pendapatan Asli daerah. Penerimaan Usaha Dinas diperkirakan mencapai sebesar *5 milyar 13 juta 498 ribu rupiah* atau meningkat sebesar *32,51 %*.

#### **b. Dana Perimbangan**

Komponen Dana Perimbangan didalam APBD Tahun Anggaran 2003 mengalami perubahan yakni masuknya komponen Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak diperkirakan mengalami penurunan sebagai dampak dari penyesuaian - penyesuain dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Begitu juga terhadap alokasi Dana Alokasi Umum dalam APBD masih ditetapkan seperti ketetapan tahun 2002 sambil menunggu ketetapan dari Pemerintah Pusat. Namun untuk Dana Alokasi Khusus telah

ada komitmen dari Pemerintah Pusat sehingga dialokasikan sebesar *6 milyar 300 juta rupiah*.

Kenaikan yang cukup signifikan berasal dari Bagi Hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Propinsi yang mengalami kenaikan sebesar *45,49 %* atau diperkirakan mencapai sebesar *10 milyar 476 juta 569 ribu rupiah*. Kenaikan tersebut disebabkan implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah disamping itu juga disebabkan kenaikan kapasitas bagi hasil seperti yang terjadi pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mengalami kenaikan cukup tinggi yakni sebesar *154,33 %*, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan sebesar *78,13 %*.

### **c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

Komponen Lain – Lain pendapatan yang Sah dalam APBD Tahun 2003 memuat Bantuan Kontijensi/Penyeimbang yang dialokasikan sebesar *23 milyar 892 juta 590 ribu rupiah* mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kenaikan yang sangat tinggi tersebut merupakan alokasi dalam rangka mengantisipasi rencana kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Fungsional tenaga pendidik.

## **2. BELANJA**

Disisi Belanja Daerah, Anggaran Belanja Tahun 2003 dirancang dengan lebih menfokuskan pada upaya untuk mewujudkan

kesinambungan fiskal, dengan memberikan stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya APBD yang sehat. Dengan demikian disamping memperhitungkan kebutuhan anggaran yang benar-benar diperlukan, penyusunan anggaran belanja Tahun 2003 juga harus memperhatikan secara seksama terhadap kapasitas dan potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah, serta kemampuan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan anggaran yang ada, baik saat ini maupun dimasa mendatang tanpa menimbulkan dampak dan beban yang berlebihan (*excess burden*) pada APBD ditahun-tahun mendatang, maka perlu dirumuskan arah dan kebijakan umum Belanja Daerah yakni :

*Pertama*, penyusunan anggaran belanja disusun berdasarkan atas kegiatan yang digariskan didalam Renstra 2003.

*Kedua*, mengantisipasi kebijakan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan fungsional tenaga pendidik di Tahun 2003.

*Ketiga*, selalu menekankan pelaksanaan anggaran belanja yang efisien dan efektif.

Secara keseluruhan disisi Belanja Daerah secara keseluruhan baik untuk Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik dialokasikan sebesar *353 milyar 711 juta 732 ribu 500 rupiah*.

Adapun rincian belanja sebagai berikut :

**Aparatur Daerah**

1. Belanja Administrasi Umum	Rp. 75.496.147.000,00
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 7.592.240.000,00
3. Belanja Modal	<u>Rp. 13.268.315.000,00</u>
Jumlah Belanja Aparatur Daerah	Rp. 96.356.702.000,00

**Pelayanan Publik**

1. Belanja Administrasi Umum	Rp. 175.197.586.000,00
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 23.540.602.000,00
3. Belanja Modal	Rp. 25.497.570.000,00
4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	Rp. 31.119.272.500,00
5. Belanja Tidak Tersangka	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Blj Pelayanan Publik	Rp. 257.355.030.500,00
Jumlah Keseluruhan	<u>Rp. 353.711.732.500,00</u>

Dari keseluruhan kebutuhan belanja daerah tersebut, proporsi yang sangat besar digunakan untuk Gaji Pegawai yang didalamnya termasukantisipasi adanya rencana kenaikan gaji Pegawai, dan untuk kegiatan yang sebagian besar masih dialokasikan ke dalam bidang Pekerjaan Umum yakni peningkatan sarana dan prasarana jalan dan perbaikan jaringan irigasi, serta bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan yang mengalami kenaikan cukup besar.

Didalam Tahun Anggaran 2003, perhatian cukup besar juga diarahkan untuk perbaikan dan memperindah Kota Lamongan. Hal ini bukan berarti bahwa Pemerintah hanya mementingkan Pembangunan di Perkotaan saja, namun demikian perhatian

yang lebih besar lagi juga diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pedesaan melalui stimulasi Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa baik melalui skeme Ronggohadi maupun melalui pendanaan pendampingan lainnya.

Disamping hal tersebut dalam Rancangan APBD Tahun 2003 ini juga telah dialokasikan untuk Badan dan Kantor baru hasil restrukturisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten yang baru yakni Badan Keuangan dan Barang Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Perijinan Daerah dan Kantor Pengolah Data Elektronik.

### **3. SURPLUS / DEFISIT**

Dari gambaran diatas, dimana Sisi Pendapatan diproyeksikan sebesar *346 milyar 125 juta 23 ribu 600 rupiah* dan kebutuhan Belanja Daerah mencapai sebesar *353 milyar 711 juta 732 ribu 500 rupiah*, maka Rancangan APBD Tahun Anggaran 2003 mengalami **Desifit** sebesar *7 milyar 586 juta 708 ribu 900 rupiah*.

### **4. PEMBIAYAAN**

sebagai upaya menjaga kesinambungan anggaran saat ini maupun dimasa mendatang, perlu adanya pencapaian efesiensi dan efektifitas belanja sekaligus mendorong pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini mutlak diperlukan guna dilakukan kebijakan anggaran yang lebih berorientasi pada pendanaan secara intern tanpa dibebani melalui Pinjaman Daerah, mengeluarkan Obligasi maupun penjualan aset yang

dipisahkan guna menutup defisit apabila kemungkinan itu terjadi dimasa mendatang.

Untuk itu arah dan kebijakan umum pembiayaan daerah dilakukan melalui :

*Pertama*, Surplus atau Defisit akan dilakukan kebijakan yang lebih menfokuskan pada pembiayaan intern guna menghindari beban yang berkelanjutan dimasa mendatang.

*Kedua*, perlu dilakukan pemberdayaan pembiayaan daerah dalam rangka menjaga kesinambungan anggaran dimasa mendatang melalui Penyertaan Modal maupun Pencadangan.

*Ketiga*, melaksanakan kewajiban pembayaran Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sebagai konsekuensi defisit yang terjadi, maka didalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sedang berjalan dalam Tahun Anggaran 2002 ini harus dilakukan upaya – upaya yang harus ditempuh sebagai berikut :

- a. Dari Sisi Pendapatan Asli Daerah yang telah kita targetkan, dilakukan usaha semaksimal mungkin sehingga dapat tercapai pelampauan target yang telah ditetapkan.
- b. Dilakukan koordinasi yang lebih mantap pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sehingga alokasi-alokasi pendapatan baik yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Dana lainnya dapat tercapai sebagaimana

yang telah ditetapkan bahkan diupayakan melampaui dari target yang telah ditetapkan.

- c. Dari sisi Belanja diupayakan juga penggunaan yang lebih menekankan pada penghematan anggaran secara efisien dan efektif sehingga pada sisi belanja terdapat sisa yang dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Dari upaya-upaya tersebut maka kebijakan yang akan diambil dengan memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2002 secara kuantitatif dapat dimaksimalkan dan diperkirakan mencapai sebesar *26 milyar 200 juta rupiah*.

Dari Sisa Lebih tersebut, dapat digunakan untuk menutup kekurangan defisit anggaran yang terjadi yakni sebesar *7 milyar 586 juta 708 ribu 900 rupiah*.

Dengan demikian pada sisi penerimaan pembiayaan terdapat selisih sebesar *18 milyar 613 juta 291 ribu 100 rupiah*. Yang akan diambil kebijakan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pengalokasian ke Dana Cadangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Lamongan maka pada Tahun Anggaran 2003 dialokasikan sebesar *15 milyar rupiah*.

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2003

- d. Dialokasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Tahun Berjalan sebesar *71 juta 707 ribu 900 rupiah.*

*Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Demikianlah pengantar Nota Keuangan APBD Tahun  
Anggaran 2003 yang dapat saya sampaikan, dengan harapan  
bahwa secara garis besar pokok-pokok kebijakan keuangan dalam  
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan  
pembangunan di Kabupaten Lamongan dapat tergambarkan.

Sebagai akhir kata, izinkanlah saya menyampaikan terima  
kasih atas segala perhatian dan kesabaran Saudara Pimpinan dan  
seluruh Anggota Dewan yang Terhormat, serta hadirin semuanya.

*Sekian terima kasih*

*Wassalammualaikum Wr Wb.*

Lamongan, 24 Desember 2002



**BUPATI LAMONGAN**

*Masfuk*  
**MASFUK**